



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2013-2017**

(Studi kaus pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata)

Oleh :

Asmiyati Atapukan *)

Rony Malavia Mardani **)

Budi Wahono *)**

Email : asmiyatiatapukan@gmail.com

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study aims to determine the regional financial performance of the Lembata district government in 2013-2017. The results of the study show that in general the financial performance of the district government is good. This is shown by the low average degree of decentralization, the very high regional financial dependency ratio, the regional financial independence ratio is still low with an intrusive pattern, the effectiveness of the local tax ratio is quite efficient, the local tax efficiency ratio is efficient, the efficiency expenditure ratio, operating expenditure ratio the total expenditure dominates the expenditure allocation compared to the capital expenditure ratio to total expenditure, the ratio of local revenue growth and the ratio of income growth to positive growth, the ratio of operating expenditure growth, and the capital expenditure growth ratio experiencing positive growth.

Keywords: *Financial Performance, Financial Ratio, Growth Ratio*

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut S. Pumadji , bahwa Pemerintahan Daerah tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan suatu daerah (Ermahita, 2011). Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *selfsupporting* bidang keuangan (Ermahita, 2011). Faktor keuangan merupakan factor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dimana daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil.

Kinerja keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah (Karlina, 2017). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun Anggaran dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat (Selly, 2013).

Kabupaten Lembata adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu daerah otonomi yang terdiri dari 9 kecamatan . kabupaten Lembata juga memiliki sumber pendapatan yang potensial untuk dioptimalkan pemberdayaannya. Sebagai kabupaten , Lembata memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sumber penerimaan pendapatan daerah yaitu : 1). PAD yang terdiri dari pajak daerah , Retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 2). Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Provinsi.

Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata memerlukan pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional demokratis transparan dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik yang akan meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Lembata .”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.

1.4 KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Lembata diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menilai kinerja keuangan dan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

II. TINJAUAN TEORI

1. Analisis Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber sumber keuangan asli daerahnya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta dapat mempunyai kebebasan penuh dalam menggunakan/memanfaatkan dana-dana bagi kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengertian Analisis Rasio

Analisis merupakan penyelidikan atau penelitian terhadap suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi, sedangkan rasio adalah alat ukur perbandingan antara dua atau lebih aspek yang dinyatakan dalam angka. Jadi analisis rasio yaitu suatu penyelidikan atau penelitian terhadap suatu peristiwa atau kegiatan dengan melakukan perbandingan antara satu dengan yang lainnya yang dinyatakan dalam bentuk angka.

3. Jenis Rasio Keuangan Daerah

1. Derajat Desentralisasi

Menurut Halim (2012), Desentralisasi adalah sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberi pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang demokratis yang dapat diwujudkan melalui pelimpahan wewenang , wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu untuk melakukan hal-hal seperti kewenangan memungut pajak , terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat,dan lain sebagainya.

2. Rasio ketergantungan keuangan daerah

Ketergantungan merupakan keadaan dimana suatu organisasi tergantung pada organisasi lainnya, sehingga organisasi tersebut tidak dapat memikul tanggung jawab sendiri. (Bima dan susanto 2010:77)

Tabel 2.1
Kriteria Rasio
Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat rendah
10,01- 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat tinggi

3. Rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian berarti mampu untuk berdiri sendiri tanpa bantuan pihak eksternal, dan mampu untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Untuk mengetahui kemandirian suatu organisasi maka perlu untuk melakukan pengukuran, dalam hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. (Halim 2012:L-5)

Tabel 2.2
Kriteria Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap transfer pusat+provinsi+pinjaman	Kemandirian	Pola hubungan
0 – 25	Sangat rendah	Instruksi
26 -50	Rendah	Konsultatif
51 – 75	Sedang	Partisipatif
76 – 100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Thoha (1991) (dalam Latuny:2016)

4. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *outcome*. Outcome merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap

masyarakat sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan (Mahsun, 2014:191).

Tabel 2.3
Kriteria Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target penerimaan Pajak Daerah	Efektivitas Pajak Daerah
>100	Sangat efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup efektif
75 – 89	Kurang efektif
<75	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi (2010: 143)

5 .Rasio efisiensi pajak daerah

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input. Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi penerimaan daerah. (Mahsun, 2014: 189).

Tabel 2.4
Kriteria rasio Efisiensi Pajak Daerah

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Penerimaan Pajak Daerah	Efisiensi Pajak Daerah
<10	Sangat efisien
10 – 20	Efisien
21 – 30	Cukup efisien
31 – 40	Kurang efisien
>40	Tidak efisien

Sumber: Mahmudi (2010: 143)

6. Rasio keserasian

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi dengan demikian

pemerintah daerah perlu untuk membuat harmonisasi belanja, guna menjaga fungsi anggaran tetap berjalan dengan baik (Mahmudi, 2010: 162).

7. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengetahui rasio ini tidak bersifat absolut tetapi bersifat relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Suatu Pemerintah Daerah telah melaksanakan efisiensi belanja apabila rasio ini kurang dari 100%, namun jika rasio lebih dari 100%, berarti tidak efisien (Mahmudi, 2010:166).

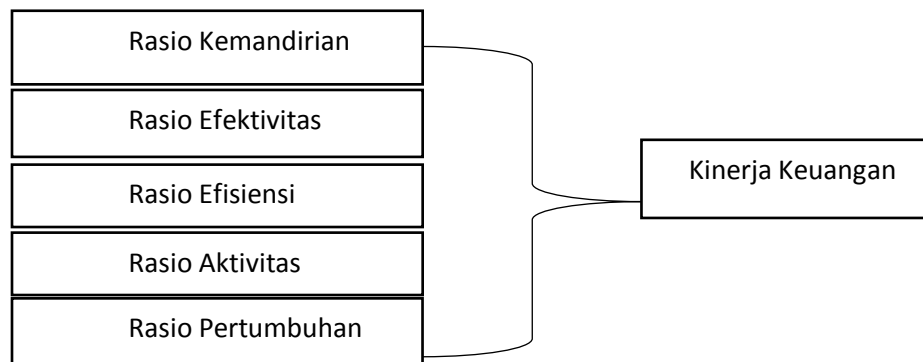
8. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari period eke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2012:L-12)

4. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi (Pasal 1 butir 2 UU 32/04), kemudian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 butir 5 UU 32/04).

Kerangka Teoritis



Gambar 2.1

Kerangka Teoritis

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dokumentasi. Menurut Suharso (2009: 104), dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan, dan sebagainya. Data ini diperoleh dari kantor badan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten Lembata berupa laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten Lembata tahun anggaran 2013-2017 dan data pemungutan pajak 2013-2017 dari badan pengelola keuangan daerah (BPKD).

Penelitian ini menggunakan metode analisis rasio yang didukung dengan data kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kinerja serta kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Lembata provinsi NTT. Pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah dituntut untuk menggunakan APBD untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah serta kemampuan keuangan daerahnya. Mengetahui kinerja keuangan daerah perlu dilakukan analisis kinerja keuangan sejauh mana upaya pemerintah daerah dari tahun ke tahun meningkatkan kinerja serta kemampuan keuangan daerah dari sumber data yang dipublikasikan.

3.2 Objek dan Subjek

Subjek pada penelitian adalah kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Lembata, Objek penelitian ini adalah laporan realisasi APBD kabupaten Lembata tahun 2013-2017.

3.3 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan delapan indikator kinerja keuangan yaitu derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah, rasio keserasian, rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan. Peneliti menelusuri laporan keuangan pemerintah daerah yang dijadikan sampel untuk mencari besaran nilai kinerja pemerintah daerah. Dari hasil penelusuran tersebut akan dipetakan laporan keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk menganalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah

berdasarkan dua indikator kemampuan keuangan yaitu rasio derajat otonomi fiskal dan indeks kemampuan rutin.

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis keuangan daerah menurut Mahmudi (2010), adalah sebagai berikut :

1. Derajat desentralisasi

$$\text{derajat desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Rasio ketergantungan keuangan daerah

$$\text{rasio ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Rasio kemandirian keuangan daerah

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{transfer pusat+propinsi+pinjaman}} \times 100\%$$

4. Rasio efektivitas pajak daerah

$$\text{rasio efektivitas pajak} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio efisiensi pajak daerah

$$\text{rasio efisiensi pajak} = \frac{\text{biaya pemungutan pajak}}{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

6. Rasio keserasian

$$\text{rasio belanja operasi terhadap total belanja} = \frac{\text{realisasi belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

$$\text{rasio ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{rasio belanja modal terhadap total belanja} = \frac{\text{realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

7. Rasio efisiensi belanja

$$\text{rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

8. Rasio pertumbuhan

a. Rasio pertumbuhan pendapatan

$$\text{rasio pertumbuhan PAD} = \frac{(PADT_t - PADT_{t-1})}{PADT_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{rasio pertumbuhan pendapatan} = \frac{(TPT_t - TPT_{t-1})}{TPT_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$PADT_t$: pendapatan asli daerah tahun t

PAD_{t-1} : pendapatan asli daerah tahun $t-1$

TPT_t : total pendapatan tahun t

TPT_{t-1} : total pendapatan tahun $t-1$

b. Rasio pertumbuhan belanja

$$\text{rasio pertumbuhan belanja operasi} = \frac{(BOT_t - BOT_{t-1})}{BOT_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{rasio pertumbuhan belanja Modal} = \frac{(BMT_t - BMT_{t-1})}{BMT_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

BRT_t : Belanja Operasi Tahun t

BRT_{t-1} : Belanja Operasi Tahun $t-1$

BPT_t : Belanja Modal Tahun t

BPT_{t-1} : Belanja Modal Tahun $t-1$

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.21 Ringkasan Analisis Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Lembata TA 2013-2017

No	Rasio	Hasil penelitian
1.	Derajat desentralisasi	4,99 %
2.	Rasio ketergantungan keuangan daerah	94,81%
3.	Rasio kemandirian keuangan daerah	5,27%
4.	Rasio efektivitas pajak daerah	90,54%
5.	Rasio efisiensi pajak daerah	118,60%
6.	Rasio keserasian	
	a. Rasio belanja operasi terhadap total belanja	78,91%
	b. Rasio belanja modal terhadap total belanja	20,87%
7	Rasio efisiensi belanja	86,70%
8.	Rasio pertumbuhan	
	Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah	28,92%
	Rasio pertumbuhan pendapatan	48,76%
	Rasio pertumbuhan belanja operasi	6,98%
	Rasio pertumbuhan belanja modal	-01,52%

1. Derajat Desentralisasi

Rata-rata derajat desentralisasi selama 5 tahun adalah sebesar 4,99%, apabila dibandingkan dengan derajat desentralisasi kabupaten jayawijaya sebesar 3,81%, kabupaten klaten yaitu 2,09% dan kabupaten jembrana 3,50% ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi pemerintah daerah kabupaten Lembata memiliki derajat desentralisasi lebih baik dari ketiga daerah tersebut.

Peningkatan derajat desentralisasi pemerintah daerah kabupaten Lembata lebih baik dari ketiga daerah tersebut , tidak menjadikan pemerintah daerah kabupaten Lembata termasuk dalam mampu menyelenggarakan desentralisasi hal ini karena rata-rata derajat desentralisasi pemerintah daerah kabupaten Lembata masih dalam kategori rendah ,ini berarti pemerintah daerah belum mampu untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah (PAD) untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang lebih baik.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rata-rata rasio ketergantungan selama tahun 2013-2017 menunjukkan angka sangat tinggi yaitu 94,81%, apabila dibandingkan dengan rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten klaten sebesar 96,44% dan kabupaten jayawijaya 96,20%, dapat terlihat bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Lembata lebih rendah dari kedua daerah tersebut.

Meskipun tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah kabupaten Lembata lebih rendah dari kedua daerah tersebut , pemerintah daerah kabupaten Lembata termasuk dalam kategori memiliki tingkat ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi, hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada dana yang diterima dari pemerintah pusat/provinsi. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah ini disebabkan masih rendahnya kontribusi PAD dibandingkan pendapatan transfer dalam total pendapatan daerah.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah adalah 5,27%, apabila dibandingkan dengan rasio kemandirian kabupaten jayawijaya 3,95% dan jembrana 4,855, kemandirian keuangan daerah kabupaten Lembata masih lebih baik dari kedua daerah tersebut, walaupun demikian rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Lembata masih termasuk dalam kategori sangat rendah dan memiliki pola hubungan instuktif ini berarti pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandirian sangat rendah. Daerah dengan pola ini dikategorikan sebagai daerah yang tidak mampu menyelenggarakan urusan otonomi daerah.

4. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rata-rata rasio efektivitas pajak daerah kabupaten Lembata selama 5 tahun adalah 90,54%, apabila dibandingkan dengan daerah lainnya, rasio efektivitas pajak daerah kabupaten klaten sebesar 103,82%, kabupaten jayawijaya 134,98% dan kota malang 117%,833, ini menunjukan bahwa setiap pemerintah daerah tersebut telah merealisasikan taraget pajak daerah dengan baik, terlihat bahwa pemerintah daerah kabupaten jayawijaya memiliki tingkat efektivitas pajak daerah paling tinggi.

Berdasarkan rata-rata rasio efektivitas pajak daerah tersebut, pemerintah daerah kabupaten Lembata memiliki kinerja yang tidak baik dalam merealisasikan target pajak daerah, ini terlihat dari setiap tahun rasio efektivitas termasuk dalam kategori tidak efektif.

5. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Rata-rata rasio efisiensi pajak adalah 118,60% , apabila dibandingkan dengan rasio efisiensi pajak daerah kabupaten klaten sebesar 12,33%, rasio efisiensi pajak daerah kabupaten Lembata termasuk tidak efisien, sedangkan kabupaten klaten termasuk efisien, yang berarti biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pajak terlalu kecil.

Berdasarkan hal tersebut dapat dinilai bahwa pemerintah daerah kabupaten Lembata tidak cermat dalam memperhitungkan biaya yang diperlu dikeluarkan untuk memperoleh pajak daerah, dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pajak daerah terlalu tinggi.

6. Rasio Kesperasian

a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio belanja operasi terhadap total belanja memperlihatkan kecendrungan berfluktuasi dari tahun 2013-2017, ini berarti bahwa alokasi belanja pada belanja operasi tidak stabil dari tahun ke tahun. Rata-rata rasio belanja adalah 78,91%, apabila dibandingkan dengan daerah lainnya yaitu kabupaten klaten memiliki porsi belanja operasi 90,33%, dan kabupaten jember 76,58%, dapat dilihat bahwa kabupaten klaten memiliki porsi belanja operasi paling tinggi ini berarti kabupaten klaten lebih mengutamakan alokasi pada belanja operasi dibandingkan belanja modal, sedangkan porsi belanja operasi kabupaten jember yang paling kecil dari kedua daerah tersebut.

b. Rasio Belanja modal terhadap Total Belanja

Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2013-2017 rasio belanja operasi terhadap total belanja mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sedangkan rasio belanja modal terhadap total belanja mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki upaya untuk terus mengupayakan pembangunan atau investasi modal jangka panjang di daerahnya, walau demikian alokasi belanja lebih didominasi oleh belanja modal.

7. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja daerah hasil penelitian dari tahun 2013-2017 menunjukkan perubahan yang fluktuasi. Rata-rata rasio efisiensi belanja adalah 86,70%, apabila dibandingkan dengan rasio efisiensi belanja daerah kabupaten klaten sebesar 100,00%, dan kabupaten jember 89,44%, kabupaten Lembata relatif lebih efisien dari kabupaten klaten dan kabupaten jember. Secara keseluruhan rasio efisiensi belanja daerah kabupaten Lembata dari tahun 2013-2017 termasuk efisien dalam pembelanjanya dan telah melakukan penghematan anggaran.

8. Rasio Pertumbuhan

a. Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dan rasio pertumbuhan pendapatan.

Rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2013-2017 menunjukkan ada

pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah 28,92% dan rasio pertumbuhan pendapatan 48,76%, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PAD daerah kabupaten jembrana sebesar 25,63, dan pertumbuhan total pendapatan daerah sebesar 13,93%. Dapat dilihat pertumbuhan total pendapatan daerah kabupaten Lembata lebih tinggi dan dalam pertumbuhan pendapatan asli daerah juga tinggi.

Berdasarkan perhitungan rasio tersebut dapat terlihat bahwa terdapat pertumbuhan yang positif setiap tahunnya, ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja keuangan pendapatan asli daerah pemerintah daerah kabupaten Lembata.

b. Rasio pertumbuhan belanja operasi dan rasio pertumbuhan belanja modal

Rasio pertumbuhan belanja operasi dan rasio pertumbuhan belanja modal menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan rata-rata masing-masing rasio adalah sebesar 6,98% dan (-01,52), apabila dilihat dari porsi tingkat pertumbuhannya, tingkat pertumbuhan belanja didominasi oleh pertumbuhan belanja operasi, dan dilihat dari segi pendapatan, pertumbuhan belanja juga diikuti oleh adanya pertumbuhan pendapatan.

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah kabupaten Lembata tahun 2013-2014 secara umum dapat dikatakan baik, walaupun desentralisasi masih rendah, ketergantungan pada pemerintah pusat/provinsi tinggi, dan kemandirian keuangan masih rendah.

1. Derajat desentralisasi pemerintah daerah kabupaten Lembata tahun 2013-2017 menunjukkan hasil masih rendah.
2. Rasio ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Lembata tahun 2013-2017 menunjukkan pemerintah daerah kabupaten Lembata memiliki ketergantungan yang sangat tinggi.
3. Rasio kemandirian pemerintah daerah kabupaten Lembata tahun 2013-2017 menunjukkan hasil masih rendah dan memiliki pola instuktif.
4. Rasio efektivitas pajak pemerintah daerah kabupaten Lembata tahun 2013-2017 sangat tidak efektif dalam pengumpulan pajak daerah.
5. Rasio efisiensi pajak pemerintah daerah kabupaten Lembata tahun 2013-2017 telah sangat efisien dalam pemungutan pajak.
6. Rasio keserasian tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah kabupaten Lembata pengalokasiannya lebih didominasi oleh belanja modal.

7. Rasio efisiensi belanja tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Lembata telah melakukan penghematan anggaran.
8. Rasio pertumbuhan pendapatan tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan pendapatan asli daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Rasio pertumbuhan belanja tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Lembata mengalami pertumbuhan yang positif.

Keterbatasan Penelitian

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini hanya menggunakan dokumentasi, sehingga tidak ada wawancara untuk menanyakan mengenai penyebab kenaikan dan penurunan atas suatu pendapatan atau belanja daerah.

Saran

1. saran bagi pemerintahan daerah kabupaten Lembata

Derajat desentralisasi, kemandirian yang rendah, dan ketergantungan masih tinggi merupakan masalah yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah kabupaten Lembata, untuk mengatasi masalah ini pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan PAD, dengan cara memperluas basis penerimaan, salah satunya dengan cara mengidentifikasi pembayar pajak potensial.

2. saran bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya perlu untuk menambahkan teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara, gunanya untuk menanyakan mengenai penyebab terjadinya suatu kenaikan dan penurunan terhadap pendapatan atau belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto.(2010). *"Evaluasi Kinerja Keuangan Daerahn Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013-2007"*. GaneC Swara Edisi Khusus Vol, 4. (Desember). No. 3.
- Ermahita, dkk, (2011), *" Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah tahun2007-2011 di kota Makassar"*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol 4 No.1.
- Assidiqi, Bahrn. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*. Skripsi. Universitas Negri Yogyakarta, Yogyakarta
- Ernawati, Ni ketut (2016), *" Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012"*, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana vol.15.3 Juni (2016): 1767-1795.
- Kaunang,(2016), *"Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah : study pada kota Manado tahun 2012-2015"*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No.02.
- Karlina, (2017), *"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD kota Surabaya Tahun 2012-2015"*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6 No. 3 2460-05585.
- Cahyadi, I. M. (2017) *Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*, skripsi.
- Fauzul, Mubin , (2017), *"Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Malang"*, skripsi.
- Pramita P.R ,(2015), *"Analisis Rasio untuk menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013"*, skripsi.
- Vendra Reza, (2017), *"Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman"*, skripsi.
- Setiyanto Aris, (2012), *"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan kota Se-Jawa Timu"*r, skripsi.
- Mianti Rara,(2014), *"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se Provinsi Bengkulu sepuluh tahun terakhir"*, skripsi
- Rudiyanto Muhamad, (2015), *"Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah"*, skripsi.
- Halim (2012) *" Akuntansi sektor public: Akuntansi Keuangan Daerah"*. Edisi Empat. Jakarta:Salemba Empat,
- Mahmudi. 2010. *"Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"*. Yogyakarta: UUP STIM
- Mahsun, Mohamad. 2014. *"Pengukuran Kinerja Sektor Publik"*. Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA.

Tabel 4.9
Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lembat
Tahun 2013 – 2017

Tahun	Pendapatan asli daerah (Rp)	Total pendapatan (Rp)	Derajat desentralisasi
2013	22.499.236.777,36	468.275.411.653,36	4,80%
2014	28.603.504.695,73	542.082.611.884,73	5,28%
2015	28.836.775.342,89	593.829.248.270,89	4,86%
2016	35.723.669.619,31	739.343.686.647,31	4,83%
2017	37.992.916.558,69	731.606.447.232,62	5,19%
Rata-rata	30.731.220.598,80	615.027.481.137,78	4,99%

Sumber : BKD kab. Lembata

Tabel 4.10
Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2013 – 2017

Tahun	Pendapatan transfer (Rp)	Total pendapatan(Rp)	Rasio ketergantungan (%)
2013	445.776.174.876,00	468.275.411.653,36	95,20%
2014	512.361.307.189,00	542.082.611.884,73	94,52%
2015	563.807.472.928,00	593.829.248.270,89	94,94%
2016	703.620.017.028,00	739.343.686.647,31	95,17%
2017	689.313.530.673,93	731.606.447.232,62	94,22%
Rata-rata	582.975.570,05	615.027.481.137,78	94,81%

Sumber : BKD kab. Lembata

Tabel 4.11
Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan asli daerah	Transfer + propinsi + pinjaman (Rp)	Rasio kemandirian keuangan daerah(%)
2013	22.499.236.777,36	445.776.174.876,00	5,05%
2014	28.603.504.695,73	512.361.307.189,00	5,58%
2015	28.836.775.342,89	563.807.472.928,00	5,11%
2016	35.723.669.619,31	703.620.017.028,00	5,08%
2017	37.992.916.558,69	689.313.530.673,93	5,51%
Rata-rata	30.731.220.598,80	582.975.700.538,99	5,27%

Sumber : BKD kab. Lembata

Tabel 4.12
Rasio Efektivitas Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2013 – 2017

Tahun	Realisasi penerimaan pajak daerah(Rp)	Target penerimaan pajak daerah (Rp)	Rasio efektivitas pajak daerah (%)
2013	4.436.074.005,22	7.861.368.566,00	56,43%
2014	3.842.201.661,80	5.056.004.000,00	75,99%
2015	5.407.991.493,83	5.364.858.101,00	100,8%
2016	8.001.534.072,87	6.500.724.863,00	123,09%
2017	7.014.880.395,00	7.279.217.500,00	96,37%
Rata-rata	5.740.536.325,74	6.412.434.606,00	90,54%

Sumber : BKD kab. Lembata

Tabel 4.13
Rasio Efisiensi Pajak Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten Lembata Tahun 2013 – 2017

Tahun	Biaya pemungutan pajak (Rp)	Realisasi penerimaan pajak daerah (Rp)	Rasio efisiensi pajak daerah (%)
2013	7.861.368.566,00	4.436.074.005,22	177,21%
2014	5.056.004.000,00	3.842.201.661,80	131,59%
2015	5.364.858.101,00	5.407.991.493,83	99,20%
2016	6.500.724.863,00	8.001.534.072,87	81,24%
2017	7.279.217.500,00	7.014.880.395,00	103,77%
Rata-rata	6.412.434.606,00	5.740.536.325,74	118,60%

Sumber : BKD kab. Lembata

Tabel 4.14
Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Lembata Tahun 2013-2017

Tahun	Total belanja operasi(Rp)	Total belanja (Rp)	Rasio belanja operasi terhadap total belanja (%)
2013	355.939.247.810,27	467.307.722.173,68	76,17%
2014	376.021.120.816,79	471.414.220.810,66	79,76%
2015	483.237.783.409,17	600.450.424.379,50	80,48%
2016	504.241.223.308,94	647.210.684.188,14	77,91%
2017	460.900.282.314,40	574.460.092.557,40	80,23%
Rata-rata	436.067.931.531,91	552.168.628.821,88	78,91%

Sumber : BKD kab. Lembata

Tabel 4.15
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten
Lembata Tahun 2013-2017

Tahun	Total belanja modal (Rp)	Total belanja (Rp)	Rasio belanja modal terhadap total belanja(%)
2013	111.179.128.863,41	467.307.722.173,68	23,79%
2014	93.584.668.353,87	471.414.220.810,66	19,85%
2015	113.815.860.970,33	600.450.424.379,50	18,96%
2016	142.948.960.879,20	647.210.684.188,14	22,09%
2017	113.059.810.243,00	574.460.092.557,40	19,68%
Rata-rata	114.917.685.861,96	552.16.682.821,88	20,87%

Sumber : BKD kab. Lembata

Tabel 4.16
Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi belanja (Rp)	Anggaran belanja (Rp)	Rasio efisiensi belanja (%)
2013	467.307.722.173,68	514.145.034.099,00	90,89%
2014	471.414.220.810,66	584.143.457.271,00	80,70%
2015	600.450.424.379,50	716.009.018.356,00	83,86%
2016	647.210.684.188,14	754.949.830.234,00	85,72%
2017	574.460.092.557,40	621.869.823.899,00	92,37%
Rata-rata	552.16.682,88	63.822.343,28	86,70%

Sumber : BKD kab. Lembata

Tabel 4.17
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Lembata Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi pendapatan asli daerah tahun n (Rp)	Realisasi pendapatan asli daerah tahun n-1 (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (%)
2013	22.499.236.777,36	21.284.014.968,62	1.215.221.808,74	05,70%
2014	28.603.504.695,73	22.499.236.777,36	6.104.267.918,37	27,13%
2015	28.836.775.342,89	28.603.504.695,73	233.270.647,16	81,55%
2016	35.723.669.619,31	28.836.775.342,89	6.886.894.276,42	23,88%
2017	37.992.916.558,69	35.723.669.619,31	2.269.246.939,38	06,35%
Rata-rata	307.312.205,99	273.894.402,81	33.417.803,18	28,92%

Sumber : BKD kab. Lembata

Tabel 4.18
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi pendapatan tahun n (Rp)	Realisasi pendapatan tahun n-1 (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Rasio pertumbuhan pendapatan (%)
2013	468.275.411.653,36	427.472.869.271,62	40.802.542.381,74	09,54%
2014	542.082.611.884,73	468.275.411.653,36	73.807.200.231,37	15,76%
2015	593.829.248.270,89	542.082.611.884,73	51.746.636.386,16	09,54%
2016	739.343.686.647,31	593.829.248.270,89	145.514.438.376,42	24,50%
2017	731.606.447.232,62	739.343.686.647,31	-7.737.239.414,69	-01,04%
Rata-rata	61,502,748,11	55.420.076,55	60826715592	48,76%

Sumber : BKD kab. Lembata

Tabel 4.18
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi pendapatan tahun n (Rp)	Realisasi pendapatan tahun n-1 (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Rasio pertumbuhan pendapatan (%)
2013	468.275.411.653,36	427.472.869.271,62	40.802.542.381,74	09,54%
2014	542.082.611.884,73	468.275.411.653,36	73.807.200.231,37	15,76%
2015	593.829.248.270,89	542.082.611.884,73	51.746.636.386,16	09,54%
2016	739.343.686.647,31	593.829.248.270,89	145.514.438.376,42	24,50%
2017	731.606.447.232,62	739.343.686.647,31	-7.737.239.414,69	-01,04%
Rata-rata	61,502,748,11	55.420.076,55	60826715592	48,76%

Sumber : BKD kab. Lembata

Tabel 4.20
rasio pertumbuhan belanja modal pemerintah daerah kabupaten Lembata
tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi belanja pembangunan tahun n (Rp)	Realisasi belanja pembangunan tahun n-1 (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Rasio pertumbuhan belanja pembangunan (%)
2013	111.179.128.863,41	79.352.469.669,11	31.826.659.194,30	24,93%
2014	93.584.668.353,87	111.179.128.863,41	-17.594.460.509,54	-63,18%
2015	113.815.860.970,33	93.584.668.353,87	20.231.192.616,46	46,25%
2016	142.948.960.879,20	113.815.860.970,33	29.133.099.908,87	39,06%
2017	113.059.810.243,00	142.948.960.879,20	-29.889.150.636,20	-47,82%
Rata-rata	114.917.685,86	108.176.217,75	6.741.468,11	-01,52

Sumber : BKD kab. Lembata